

HARI **ANTI-TAMBANG**

MELAWAN EKSTRAKTIVISME
MERAWAT KEHIDUPAN, MENYATUKAN PERLAWANAN



SERUAN AKSI HATAM 2025

29 Mei 2025 di Seluruh Tapak Perlawanan Tambang



Tongkang muatan batu bara
di Kalimantan Timur. Dok: JATAM Kaltim



Penggundulan hutan proyek PLTA Mentarang.
Dok: Mongabay

KALIMANTAN DIJARAH TANPA HENTI

Kalimantan menjadi bukti nyata bagaimana sebuah pulau dijarah tanpa henti. Tambang batubara meninggalkan lubang-lubang maut; sawit menggusur hutan adat dan merampas tanah ulayat; proyek pangan dan energi merusak keseimbangan ekologis. Pangan dan air di Kalimantan makin terancam, ironisnya pulau sebesar itu kini bergantung pada pasokan dari luar. Sejak 2011, lebih dari 51 anak tewas tenggelam di lubang tambang yang dibiarkan terbuka oleh perusahaan. Dan, ini hanya di Kalimantan Timur saja. Namun alih-alih menghentikan kerusakan, negara justru memperparah dengan menghadirkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di tengah kehancuran tersebut—mengokupasi lahan dan mengurus paksa rakyat dan habitat satwa, serta menyambungkan proyek industri hijau di Kalimantan Utara, mulai dari PLTA Kayan, kawasan industri, hingga tambang mineral. Semua dibungkus jargon transisi energi, padahal yang terjadi adalah ekspansi kehancuran.

APA YANG KITA HADAPI?

Indonesia hari ini sedang menghadapi krisis ekologis yang semakin parah, akibat sistem ekonomi yang dibangun di atas fondasi ekstraksi. Sebagai konsekuensinya, alam, manusia, dan pengetahuan dijadikan objek eksploitasi tanpa batas. Untuk memuluskannya, negara kemudian menjalankan kekerasan yang terstruktur, mulai dari menyiapkan regulasi pro investor sampai dengan menghajar warga di lapangan menggunakan aparat bersenjata.

Atas nama pembangunan dan transisi energi, negara dan korporasi merampas tanah dan menggusur rakyat. Meracuni air, tanah, udara dan tubuh manusia, hingga membungkam suara kritis rakyat dengan intimidasi dan kriminalisasi. Seperti yang terjadi di wilayah tambang nikel, geothermal, smelter, PLTA, hingga di kawasan industri raksasa lainnya yang diklaim “berkelanjutan.” Di balik seluruh proyek tambang dan industri ekstraktif ini, terdapat para pemilik modal Internasional yang bersekongkol dengan para elit politik nasional yang diuntungkan, hal ini lah yang kita sebut sebagai kolonialisme industri ekstraktif di Indonesia.





Lumpur panas di Mataloko, NTT, akibat operasi PLTP Mataloko.



Lumpur panas di Mandailing Natal, akibat dari operasi PLTP PT Sorik Marapi Geothermal. Dok: Warga

Di Mandailing Natal, Sarulla, Dieng, Poco Leok, Mataloko dan sejumlah wilayah lainnya, warga hidup dengan udara beracun dari proyek geothermal yang diklaim sebagai energi bersih. Padahal, kehidupan mereka terancam: sebagian warga mengalami sesak napas, kulit gatal, air tercemar, dan kesehatan terganggu. Ketika bersuara, mereka diteror, dipukul, bahkan dikriminalisasi. Inilah wajah transisi energi di Indonesia—yang katanya demi menyelamatkan bumi, tapi justru menyakiti rakyat.



Erfaldi

Salim Kancil

Rusel

MELAWAN TAMBANG BERARTI BERTARUH NYAWA: MUARA KATE, PARIGI MOUTONG, LUMAJANG

Di Muara Kate, Paser, masyarakat adat, Rusel (60 tahun) dibunuh karena memblokir truk pengangkut batu bara. Di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Erfaldi menjadi simbol perlawanan yang direnggut nyawanya. Masih berusia 21 tahun, ia tewas ditembak polisi saat aksi menolak tambang emas pada 2022. Namanya menyusul Salim Kancil di Lumajang, Jawa Timur, yang dianiaya hingga tewas karena menolak tambang pasir besi pada 2015. Kasus ini mengingatkan kita bahwa melawan tambang di Indonesia bisa berarti mempertaruhkan nyawa.



KEMENANGAN RAKYAT DI PENGADILAN TAK BERARTI: SANGIHE, WAWONII, DAIRI

Di Sangihe, Wawonii, dan Dairi, rakyat menjaga tanah, air, dan tubuh pulau dari eksploitasi tambang raksasa. Mereka menggalang kekuatan hukum, menanam palang, dan menjaga kampung. Bahkan ketika menang gugatan—seperti warga Wawonii dan Sangihe, yang membuktikan izin lingkungan dan izin penggunaan kawasan hutan cacat hukum— negara tetap bungkam, korporasi tetap jalan, dan aparat tetap siaga. Di Dairi, tambang seng dipaksakan di zona gempa. Di negeri ini, kemenangan rakyat di pengadilan pun bisa tak berarti.



Bencana lumpur Lapindo

PULAU JAWA JUGA MENGHADAPI KRISIS EKOLOGI

Pulau Jawa juga terus diporak-porandakan oleh logika pembangunan yang menyingkirkan rakyat demi pertumbuhan semu. Di Kendeng, pegunungan karst yang menjadi benteng air dan kehidupan dibelah untuk pabrik semen, mengabaikan jeritan para ibu penolak tambang yang menyemen kakinya di depan Istana. Di Jabodetabek, pencemaran udara telah mencapai tingkat mematikan, menjadikan napas sebagai kemewahan dan penyakit sebagai harga hidup di kota. Lahan-lahan pertanian produktif dikorbankan untuk jalan tol, bandara, dan kawasan industri, membuat ketahanan pangan kian rapuh dan petani tercerabut dari tanahnya. Tragedi lumpur Lapindo di Sidoarjo menjadi tonggak kelam, ketika keserakahan industri ekstraktif menenggelamkan 16 desa, memaksa puluhan ribu orang mengungsi, dan negara justru melindungi pelaku kejahatan. Kini, Jawa menuju titik kolaps: krisis air, krisis pangan, dan krisis kesehatan menjadi bayang-bayang nyata dari sistem pembangunan yang tak berpihak pada kehidupan.



PLTA Batang Toru berlokasi di Sungai Batang Toru, Desa Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dok: Betahita

BERBAGAI KONFLIK AGRARIA DAN TAMBANG DI SUMATERA

Di Dairi, tambang seng dan timbal tetap dipaksakan di tengah ancaman gempa dan banjir. Di Batang Toru, PLTA dan tambang emas menghancurkan bentang alam rumah orangutan Tapanuli. Di sisi lain, perkebunan sawit dan HTI terus meluas, menggusur hutan adat dan menciptakan konflik agraria yang tak berujung.



Pemukiman warga yang berdampingan dengan PLTU Harita, di desa Kawasi, Pulau Obi. Dok: Rikfi Anwar

MARABAHAYA TERBIT DARI TIMUR: SULAWESI, MALUKU, PAPUA

Di kepulauan Sulawesi dan Maluku, hingga Papua bagian barat, smelter dan industri nikel menjulang tinggi atas nama transisi energi dan ekonomi hijau. Namun yang terjadi adalah pengusiran, pencemaran, dan kemiskinan. Laut tercemar limbah tambang, ekosistem rusak, nelayan kehilangan tangkapan. Di darat, udara dan air bersih makin langka. Mereka yang bersuara ditangkap, diteror, bahkan diseret ke pengadilan. Di Obi, Morowali, Halmahera, dan sejumlah wilayah tempat proyek sejenis dijalankan, rakyat dijadikan korban demi proyek yang katanya demi masa depan.



Pembukaan lahan proyek food estate di desa Wanam, Papua - thegeckoproject/Ulet Ifansasti

Tanah Papua menjadi ladang perampasan terbesar: gunung dikeruk, sungai diracuni tailing, hutan adat digunduli. *Freeport*, yang telah puluhan tahun mengeksploitasi emas dan tembaga di Tembagapura, meninggalkan luka ekologis dan sosial. Suku Amungme dan Kamoro terus bergulat dengan kemiskinan dan kehilangan ruang hidup. Di Bintuni, blok gas yang dikelola perusahaan raksasa justru menghilangkan akses masyarakat atas tanah dan laut. Kekerasan menyertai tiap perlawanan: penembakan, penangkapan, dan intimidasi menjadi bahasa negara terhadap rakyat. Proyek *food estate* pun menyasar Papua, mengatasnamakan ketahanan pangan tapi faktanya menjadi jalan masuk ekspansi korporasi.



HARI ANTI-TAMBANG 2025: **MELAWAN EKSTRAKTIVISME,** **MERAWAT HIDUP,** **MENYATUKAN PERLAWANAN**

Situasi getir yang dialami rakyat di berbagai pulau Indonesia ini, menempatkan Hari Anti-Tambang (HATAM) menjadi sangat relevan. HATAM—dimana tragedi Lapindo sebagai tonggak awal, menjadi titik temu: menyatukan kekuatan gerakan yang selama ini tercerai-berai.

HATAM bukan sekadar simbol perlawanan terhadap ekstraktivisme, tapi seruan untuk menghentikan sistem yang membunuh perlahan. Ini suara dari anak-anak yang tak bisa sekolah karena desanya tenggelam. Dari petani yang kehilangan sawah, dari perempuan yang kehilangan mata air, dari orang tua yang kehilangan anak, dari istri yang kehilangan suami.

HATAM adalah ajakan untuk bersatu. Warga adat, petani, nelayan, buruh, perempuan, mahasiswa—harus menyatu dalam satu barisan. Saatnya membangun kekuatan kolektif dan menyusun ulang narasi pembangunan dari perspektif rakyat, bukan pemerintah, apalagi investor. Kita tidak anti kemajuan. Tapi kita menolak kemajuan yang dibangun di atas reruntuhan kehidupan. Kita tidak anti kekayaan. Tapi kita melawan kekayaan yang tumbuh dari penderitaan rakyat.

Sebab, melawan adalah bagian dari merawat kehidupan.